



**BADAN PENGARAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN
OTONOMI KHUSUS PAPUA (BP3OKP)
SEKRETARIAT BP3OKP PROVINSI PAPUA TENGAH**

JALAN MERDEKA NO 46 NABIRE

Kontak : (0984) 22350;

Email: bpp_papteng@gmail.com

Website : <https://badanpengarahpapua.go.id/>

Nomor : 25/IV/2026/BP3OKP.PT
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Penyampaian Laporan Kegiatan bulan April 2026

Kepada Yth,
Sekretariat Badan Pengarah Papua
Di -
Jayapura

Surat Pengantar

1. Berdasar:
 - a) Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Badan Pengarah Papua
 - b) Peraturan Ketua BP3OKP No.1 Tahun 2023 Tentang OTK BPP Sesuai Pasal 2 Dan 3 Tugas Dan Fungsi BP3OKP.
2. Berikut Ini Kami Menyampaikan Laporan Kegiatan BPP Provinsi Papua Tengah Bulan April 2026.

Demikian Kami Sampaikan Laporan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama kami ucapkan banyak terima kasih.

Nabire, 30 April 2026

ANGGOTA BP3OKP PAPUA TENGAH



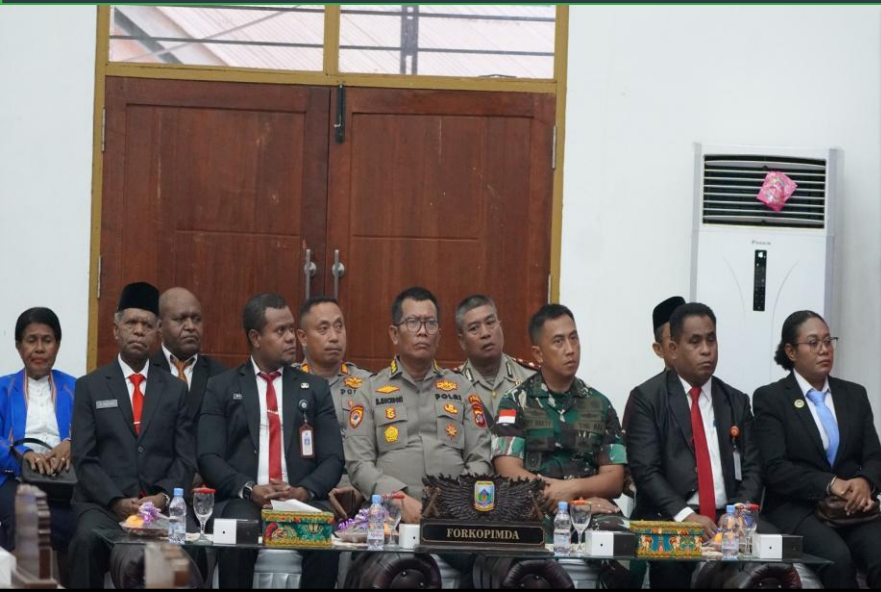
IRJEN POL (P) DRs.PIETRUS WAINE, S.H.,M.HUM



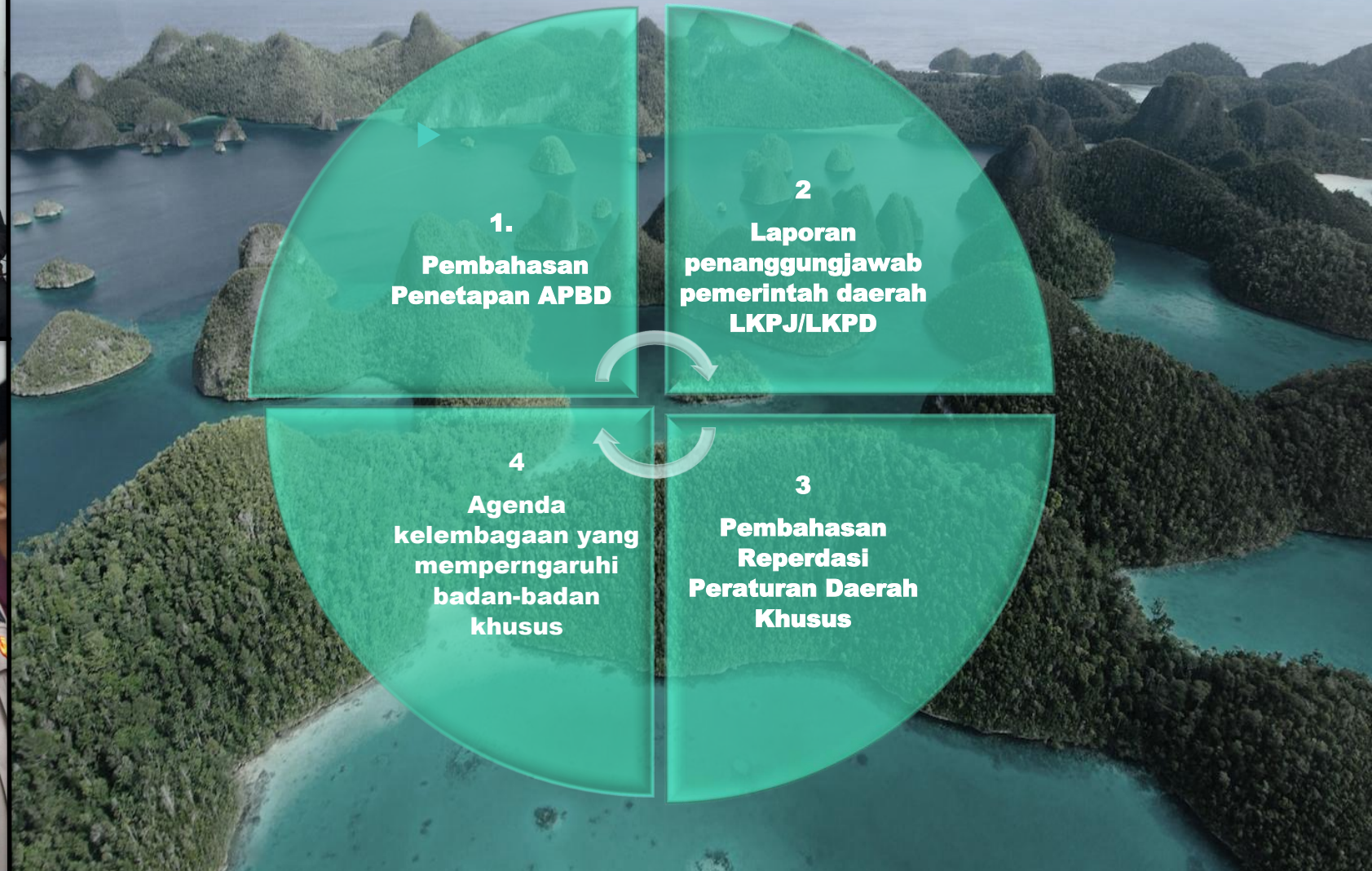


**Laporan Kegiatan
BPD Bulan April
2026**

Anggota BPP Menghadiri Rapat Paripurna dpr pada 1 april 2026



Pembahasan Rapat



BPP Provinsi Papua Tengah Melakukan Rakor bersama Badan-Badan Otsus Papua 07 April 2026

Hasil Kesepakatan Rakor

Maksud dan Tujuan Rakor



- Gubernur dan para bupati wajib menyampaikan laporan pengelolaan dana otonomi khusus secara priode triwulan dan tahunan kepada BP3OKP, MRP, DPRP dan DPRK.
- Gubernur dan para bupati wajib melibatkan BP3OKP secara aktif bersama Badan-Badan Otonomi Khusus dalam pembahasan prioritas program-program mulai dari musrembang Kabupaten, Provinsi dan Pusat.
- Gubernur dan para bupati wajib menyampaikan program-program yang pembiayaannya bersumber dari dana otonomi khusus, pada awal januari tahun anggaran berjalan kepada BP3OKP, MRP, DPRP dan DPRK.
- BP3OKP, MRP, DPRP dengan BPKP Provinsi Papua Tengah melakukan PKS tentang Pengawasan Program dan Anggaran Pelaksanaan Otsus.
- Menyurati ke gubernur dan para bupati tembusan setwapres ,mendagri kemenkeu, Bappenas dan kementerian teknis.
- Alternative lain surat disampaikan kewapres RI, jika dalam tata kelola otsus dibutuhkan kebijakan khusus oleh pusat terkait program dan anggaran otsus.
- Pembahasan secara substantif bersama baperinda dengan badan-badan khusus sebelum menyurat kesetwapres RI.
- Badan-Badan Khusus Otsus Perlu Ada Regulasi Khusus Untuk Mengelola Keuangan Yang Sumber Dananya Dari Otsus kepada wapres dan kementerian terkait.
- Badan-badan khusus perlu ada regulasi khusus tentang dana oprasional
- Badan-badan khusus wajib melakukan rapat koordinasi persemester.
- Badan-badan khusus akan melakukan pemantauan sebagai tidak lanjut hasil evaluasi laporan penggunaan dana otsus perprovinsi dan kabupaten/kota.



Rapat SHEK BPP Provinsi Papua Tengah bersama DPRP Pengangkatan 08 April 2026

Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BPP) Papua Tengah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah (DPRP) melaksanakan rapat koordinasi guna membahas jalannya pengawasan Otonomi Khusus (Otsus), khususnya dalam proses pengangkatan unsur kelembagaan di Papua Tengah.

Rapat ini menegaskan bahwa pengawasan pelaksanaan Otsus merupakan aspek krusial dalam memastikan seluruh kebijakan, termasuk proses pengangkatan, berjalan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua. BPP menekankan pentingnya pengawasan yang sistematis, terukur, dan berkelanjutan agar tidak terjadi penyimpangan dalam implementasinya.

Dalam forum tersebut, DPRP Papua Tengah menyoroti perlunya peran aktif lembaga legislatif dalam fungsi pengawasan, khususnya untuk memastikan keterwakilan Orang Asli Papua (OAP). Adapun beberapa poin penting hasil rapat, antara lain:

- Penguatan mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan Otsus di Papua Tengah.
- Sinergi antara BPP dan DPRP dalam melakukan monitoring dan evaluasi.
- Pelibatan unsur masyarakat adat, tokoh perempuan, dan pemuda dalam fungsi pengawasan.
- Perlunya regulasi teknis yang lebih jelas sebagai dasar pengawasan.
- Penegasan komitmen untuk menjaga keberpihakan kepada Orang Asli Papua (OAP).

Rapat ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola Otsus di Papua Tengah, sehingga proses pengangkatan dan kebijakan lainnya dapat berjalan secara transparan, adil, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat Papua.



POKJA PAPUA SEHAT MELAKUKAN RAPAT ZOOM BERSAMA RSUD PRATAMA WAGHETE KABUPATEN DEIYAI & KEMENTERIAN KESEHATAN TOPIK RAPAT MENGENAI AKREDITASI RSUD, 20 APRIL 2026

Tujuan Rapat

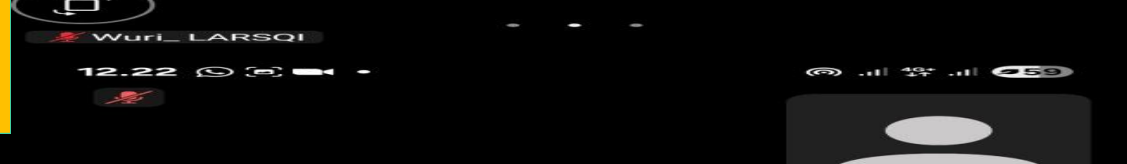
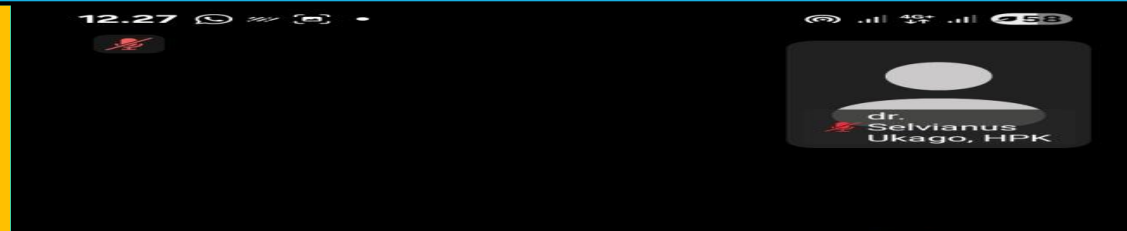


- Meningkatkan pemahaman Pokja terhadap standar akreditasi
- Menyamakan persepsi terkait implementasi elemen penilaian
- Mengidentifikasi kesiapan dokumen dan implementasi di lapangan

Hasil Rapat



- Sebagian besar Pokja harus memahami standar akreditasi secara umum
- Mempersiapkan dokumen-dokumen dan Masih diperlukan sosialisasi kepada staf di unit pelayanan
- Perlu peningkatan implementasi di lapangan



Wuri_LARSQI

Wuri_LARSQI

Wuri_LARSQI

Wuri_LARSQI

Wuri_LARSQI

Wuri_LARSQI

Wuri_LARSQI

Wuri_LARSQI

Wuri_LARSQI

Wuri_LARSQI

PERUBAHAN KMK HK 01/07/MENIKES/1129/2022 MENJADI
HK 01/07/MENIKES/1299/2024 TENTANG STANDAR AKREDITASI RUMAH SAKIT

REKAM MEDIS	AUDIT MEDIS DAN AUDIT KLINIS
PELAYANAN KESEHATAN JIWA	SAD CMRKT - EVALUASI PERBAIKAN PELAYANAN KLINIS
SAD PMS 2 - DAN 2.3	KREDENSIALING BMS
PPRA	PENILAIAN PELAKSANAAN AKREDITASI
SAD PROGRAM NASIONAL 6	DEWANI BERGAWAS
FRAUD	SAD TRRS 1
SAD TRRS - TANGGUNGJAWAB PIMPINAN RS	
INDIKATOR MUTU KLINIS	
SAD CMRKT 2 - IMP RS	

Pokja Papua damai Mewakili Anggota BPP dalam Menghadiri peresmian beroperasinya Batik air di Papua Tengah, 22 April 2026

Langkah strategis ini dilakukan untuk memperluas jangkauan transportasi udara di Indonesia Timur. Kehadiran Batik Air di Nabire diharapkan mampu mempermudah mobilitas masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Penerbangan perdana ini disambut antusias oleh pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Tradisi *water salute* dilakukan sebagai bentuk penghormatan bagi pesawat yang baru pertama kali mendarat di bandara tersebut.

Konektivitas udara di wilayah Papua Tengah semakin meningkat pada tahun 2026 ini. Batik Air resmi membuka layanan penerbangan berjadwal yang menghubungkan Bandar Udara Douw Aturure, Nabire dengan kota-kota besar lainnya.



Zoom Meeting anggota BPP 6 Provinsi dan KPK tentang pengawasan Otsus 23 April 2026

Maksud dan Tujuan

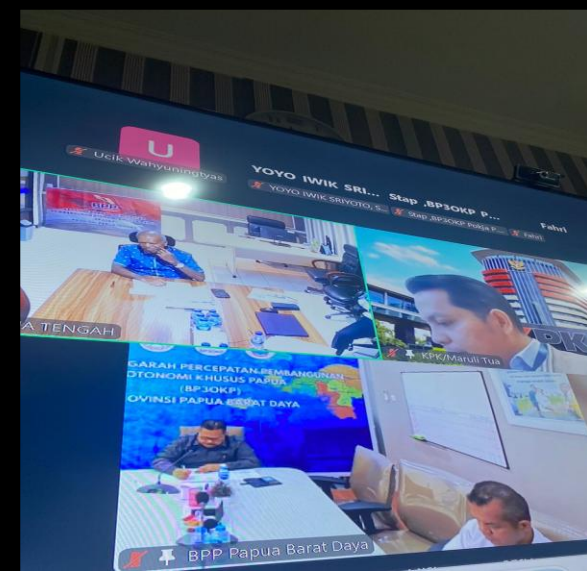
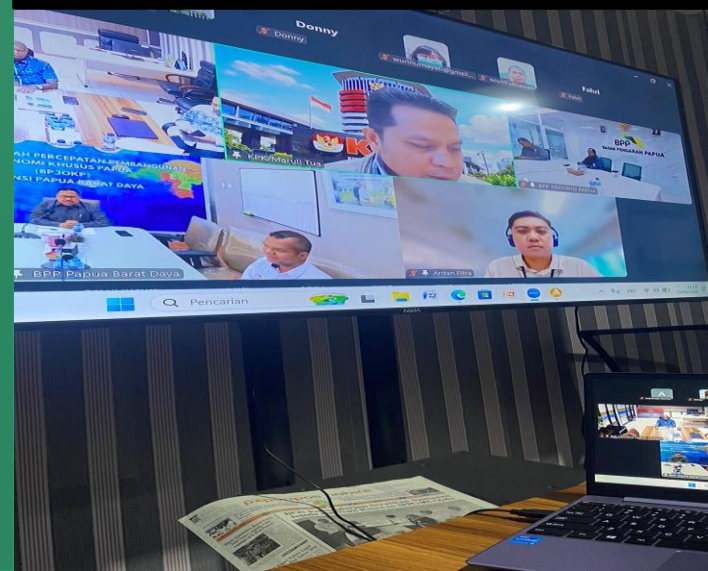
- Meningkatkan koordinasi antara BPP dan KPK dalam pengawasan dana Otsus.
- Mendorong sistem pelaporan yang transparan, akurat, dan tepat waktu.
- Mengidentifikasi potensi risiko penyalahgunaan anggaran Otsus.
- Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel di Papua.

Hasil / Kesimpulan Rapat

- Disepakati peningkatan pengawasan melalui sistem digital dan pelaporan berkala.
- KPK akan melakukan pendampingan dalam penguatan sistem pencegahan korupsi.
- BPP akan mendorong pemerintah daerah untuk lebih disiplin dalam pelaporan penggunaan dana Otsus.
- Diperlukan standar pelaporan yang seragam di seluruh wilayah Papua.

Tindak Lanjut

- Penyusunan mekanisme pelaporan terpadu dana Otsus.
- Pelaksanaan bimbingan teknis (Bimtek) bagi OPD terkait.
- Monitoring dan evaluasi berkala oleh BPP bersama KPK.
- Penguatan peran pengawasan internal daerah (Inspektorat).



Kegiatan SHEK dgn Bappeda Kabupaten Nabire tentang data evaluasi tata kelola dana otsus tahun 2025, 27 April 2026



Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Nabire secara resmi menyerahkan data hasil evaluasi tata kelola dana Otonomi Khusus (Otsus) Tahun 2025 kepada Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BPP).



Penyerahan data ini merupakan bagian dari upaya memperkuat fungsi pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Otsus, khususnya dalam aspek pengelolaan keuangan daerah. Data yang diserahkan mencakup perencanaan, pelaksanaan, serta capaian program yang didanai melalui dana Otsus sepanjang tahun 2025 di Kabupaten Nabire.



Dalam kesempatan tersebut, Bappeda Kabupaten Nabire menyampaikan bahwa evaluasi ini bertujuan untuk memastikan penggunaan dana Otsus berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta tepat sasaran bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP).

Anggota BPP menghadiri Undangan upacara dalam rangka HUT Otsus, di halaman Kantor Gubernur 27 April 2026



Maksud dan tujuan upacara

Upacara atau kegiatan peringatan Otsus Papua memiliki tujuan:

- Mengingatn sejarah pemberlakuan Otsus Papua
- Mengevaluasi pelaksanaan Otsus di daerah
- Mendorong peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP)
- Memperkuat komitmen pemerintah daerah dan pusat

ANGGOTA BPP MENGHADIRI UNDANGAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI PAPUA TENGAH DALAM ACARA KULIAH PERDANA MAHASISWA PROGRAM RPL, 27 APRIL 2026

MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN



meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Provinsi Papua Tengah melalui akses pendidikan tinggi.

Memberikan kesempatan kepada masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP), untuk melanjutkan pendidikan melalui Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).

Mengakui pengalaman kerja dan pembelajaran sebelumnya sebagai bagian dari proses pendidikan formal.

Mendorong peningkatan kompetensi dan profesionalitas tenaga kerja lokal.

Mendukung percepatan pembangunan daerah melalui sektor pendidikan.



ANGGOTA BPP BESERTA POKJA MENGHADIRI RAPAT SHEK DENGAN KPPN NABIRE, 27 APRIL 2026 DI AULA KPPN.



Hasil Rapat

Pemaparan Materi oleh KPPN Nabire

Sesi diskusi

1

Rapat koordinasi BP3OKP dan KPPN/Sekretariat telah dilaksanakan dengan baik di Ruang Rapat KPPN Nabire.

2

Disepakati kebijakan efisiensi anggaran pengurangan dana perjalanan dinas dan pelaksanaan rapat di kantor.

3

Proses penambahan anggota BP3OKP akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang telah disepakati.

4

Penyelesaian ruang kerja BP3OKP menjadi prioritas yang akan ditindaklanjuti segera.

5

Pengawasan Dana Desa dipertegas melalui sinergi BP3OKP, KPPN, dan instansi terkait

Penyerahan dokumen laporan penggunaan Anggaran Otsus 2025 dari Baperinda kabupaten nabire kepada BPP Provinsi Papua Tengah, 27 April 2026

Maksud:

- ▶ Penyerahan dokumen laporan penggunaan Anggaran Otonomi Khusus (Otsus) Tahun 2025 dari Baperinda Kabupaten Nabire kepada BPP Provinsi Papua Tengah dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai melalui Otsus.

Tujuan:

- ▶ Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana Otsus di Kabupaten Nabire.
- ▶ Menyampaikan capaian program serta realisasi penggunaan anggaran Otsus Tahun 2025 kepada BPP Provinsi Papua Tengah.
- ▶ Menjadi bahan evaluasi bagi BPP dalam melakukan pengawasan pelaksanaan Otsus di daerah.
- ▶ Mengidentifikasi kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan program Otsus untuk perbaikan ke depan.
- ▶ Mendorong peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan dana Otsus dalam mendukung kesejahteraan masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP).



Anggota BPP di undang sebagai pemateri dalam Kegiatan Musrembang Otsus hari provinsi papua tengah, 28 April 2026

1. Pembukaan
Musrembang Otsus
Provinsi Papua
Tengah

2. Pemaparan Materi

1. Kepala BPP Provinsi Papua Tengah
2. Kepala BPKP Papua Tengah
3. Skala Papua Tengah
4. Universitas Terbuka (UT)
5. KPA Papuan Tengah



Kesimpulan :

- Sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan Otsus
- Pengawasan pelaksanaan program dan anggaran
- Evaluasi kinerja pembangunan Otsus dan pelaporan anggaran otsus
- Memberikan rekomendasi strategis kepada pemerintah

Pembahasan Materi Rapat Koordinasi Pendidikan se Provinsi Papua Tengah, Tanggal 5-8 Mei 2026 di Hotel Mahavira Nabire

- ▶ Pembahasan Alokasi Otsus Per Kabupaten tahun 2026 se Provinsi Papua Tengah. Peruntukan Dana OTSUS masing-masing Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi per kabupaten dan provinsi.
- ▶ Menyiapkan materi Kepala BP3OKP Papua Tengah pada kegiatan Rapat Koordinasi Pendidikan Tingkat provinsi yang akan melibatkan kepala dinas pendidikan dari 8 kabupaten, UPT Kementerian yang ada di Papua dan BP3OKP Papua Tengah
- ▶ Sinkronisasi Program dan Kegiatan RAPP dengan program dan kegiatan dari Kabupaten yang akan menggunakan dana OTSUS Tahun 2026
- ▶ Penyamaan persepsi dalam penyusunan program bidang pendidikan antara UPT Kemdikdasmen di Papua, Provinsi dan kabupaten sesuai RAPP



Foto rapat persiapan bahan/materi Kepala BP3OKP pada acara Rapat Koordinasi Pendidikan Tingkat Provinsi Papua Tengah, Nabire 28 April 2026

ANGGOTA BPP MENGHADIRI UNDANGAN PENUTUPAN MUSREMBANG OTSUS PROVINSI PAPUA TENGAH, 30 APRIL 2026



Terima Kasih